



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

GAP FUNDING PROYEK RUPTL PLN

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Madya
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2022, menemukan adanya kekurangan pendanaan atau *gap funding* sebesar Rp108,67 triliun yang dicatat oleh PT PLN (Persero) atau PLN untuk pembangunan pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030. *Gap funding* ini menyebabkan realisasi pembangunan pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya dalam RUPTL tersebut menjadi tidak optimal. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN Tahun 2021 dan 2022, kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk proyek yang tertuang dalam RUPTL Tahun 2021-2030 masing-masing sebesar Rp78,9 triliun pada tahun 2021 dan sebesar Rp73,1 triliun pada tahun 2022. Namun, PLN hanya mampu memenuhi pendanaan sebesar Rp19,93 triliun untuk tahun 2021 dan sebesar Rp23,4 triliun untuk tahun 2022.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan keterkejutannya atas adanya *gap funding* yang cukup besar dalam rencana investasi PLN, yang artinya PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan investasi sebesar Rp70 triliun per tahun untuk merealisasikan RUPTL. Kesulitan pendanaan ini diduga disebabkan oleh fundamental keuangan PLN yang kurang baik. Namun jika melihat pencapaian kinerja PLN di tahun 2021-2022 yang mencatat rekor keuntungan terbesar, seharusnya kemampuan pendanaan PLN cukup tinggi. Pada tahun 2022 lalu, PLN membukukan laba bersih sebesar Rp14,4 triliun atau meningkat 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut bahkan lebih tinggi 124% dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6,4 triliun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang, menyarankan PLN untuk segera merevisi RUPTL Tahun 2021-2030 karena realisasi pembangunan pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya dalam RUPTL tersebut sudah tidak sesuai dengan proyeksi awal. *Gap funding* yang dialami PLN menyebabkan tertundanya sejumlah rencana investasi dari pengembang listrik swasta.

Permasalahan *gap funding* yang dialami PLN dalam merealisasikan RUPTL Tahun 2021-2030 tentu perlu disikapi secara serius karena dapat berdampak pada target pemerintah untuk sistem ketenagalistrikan nasional. PLN tentu tidak akan mampu mendanai secara mandiri seluruh proyek dalam RUPTL karena harus mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan yang berkelanjutan dan alokasi investasi korporasi. Kementerian ESDM pun mendorong PLN untuk memperluas skema bisnisnya agar dapat menjaring pendanaan internasional. Potensi pendanaan internasional masih cukup besar, termasuk dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Terlepas dari itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk dapat meyakinkan kreditur berinvestasi pada proyek-proyek dalam RUPTL Tahun 2021-2030.

Atensi DPR

Hasil Audit BPK menemukan adanya *gap funding* sebesar Rp108,67 triliun yang dicatat oleh PLN untuk pembangunan pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang tertuang dalam RUPTL Tahun 2021-2030. *Gap funding* ini menyebabkan realisasi proyek-proyek dalam RUPTL tersebut menjadi tidak optimal. Permasalahan *gap funding* yang dialami PLN dalam merealisasikan RUPTL Tahun 2021-2030 tentu perlu disikapi secara serius karena dapat berdampak pada target pemerintah untuk sistem ketenagalistrikan nasional. Komisi VII DPR RI perlu meminta PLN untuk lebih berkomitmen dan berupaya maksimal menarik peluang investasi ke dalam negeri dalam rangka merealisasikan proyek-proyek dalam RUPTL Tahun 2021-2030. Komisi VII DPR RI juga perlu meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada PLN dengan meyakinkan investor untuk berinvestasi pada proyek-proyek PLN.

Sumber

Bisnis Indonesia, 31 Januari 2024;
ekonomi.bisnis.com, 31 Januari 2024; dan
industri.kontan.co.id, 2 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024